

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

# LKjIP

**DISKOMINFO  
KAB. SEMARANG**

Jl. Diponegoro No. 14  
Gedung D, Ungaran 50511  
Telp. (024) 76901553

# 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk memperlengkapjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Diskominfo Kabupaten Semarang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jbaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang Tahun 2024 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Ungaran, Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Semarang



PETRUS TRIYONO, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197204231992031005

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang memiliki 7 indikator kinerja terdiri dari 4 indikator kinerja tujuan dan 3 indikator kinerja sasaran strategis dengan capaian sebagai berikut:

No	Urusan, Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	3.26	3.31	101,53
2	Persentase pengelolaan informasi, aduan dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	%	100	100	100
3	Indeks Tata Kelola SPBE	nilai	3.4	3.0	88.24
	<b>URUSAN STATISTIK</b>				
4	Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral	%	100	100	100
5	Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat	%	100	100	100
	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>				
6	Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan	%	100	100	100
7	Persentase pengamanan Informasi sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Semarang

Dalam hal penggunaan anggaran dari total anggaran sebesar Rp 8.123.087.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.840.318.628,- dengan persentase serapan anggaran sebesar 96,52%. Tingkat efektifitas penggunaan sumber daya

terhadap pencapaian kinerja sasaran menunjukkan kategori “efektif”. Dengan capaian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Target Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.747.643.700	1.658.943.506	94,92
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.400.345.300	1.356.369.493	96,86
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	259.592.400	236.209.016	90,99
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	374.450.000	340.538.939	90,94
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.341.055.600	4.248.257.674	97,86
	Jumlah	8.123.087.000	7.840.318.628	96,52

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Semarang*

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024
Tabel 1.2	Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024
Tabel 3.3	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Semarang Tahun 2024
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Aksi Tahun 2024 (dari aplikasi E-SAKIP dan sudah berasman)
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan Tahun 2024 (sudah berasman)
- Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan (dari aplikasi E-SAKIP)
- Lampiran 4 Evaluasi Capaian Triwulan I, II, III, IV (dari aplikasi E-SAKIP dan semua sudah berasman)
- Lampiran 5 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (dari aplikasi E-SAKIP)

## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN .....	8
A. Gambaran Umum.....	8
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	8
2. Sumber Daya Manusia .....	17
3. Sarana dan Prasarana .....	18
B. Tujuan dan Sasaran .....	20
C. Permasalahan Strategis.....	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	29
A. Rencana Kinerja Tahunan .....	29
B. Perjanjian Kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	38
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	38
B. Evaluasi Kinerja.....	40
C. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	50
D. Realisasi Anggaran.....	60
E. Tindak Lanjut Terhadap LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 .....	63
BAB IV PENUTUP .....	65
KESIMPULAN DAN SARAN .....	83
1. Kesimpulan .....	83
2. Saran.....	84
LAMPIRAN .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

#### **1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Tipologi PD Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 sesuai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Daerah bahwa tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang sebagai berikut:

##### **a. Kepala**

- 1) Tugas  
Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik
- 2) Fungsi
  - a) Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatic, bidang persandian dan bidang statistik
  - b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi, Aplikasi dan Informatika, persandian dan statistik; dan
  - c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi, Aplikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
- 3) Uraian Tugas
  - a) Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi, Aplikasi dan Informatika persandian dan Statistik.
  - b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
  - c) Merumuskan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi, aplikasi dan informatika persandian dan statistic
  - d) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi, Aplikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
  - e) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan Kerjasama dibidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistic

- f) Merumuskan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
- g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **b. Sekretariat**

### 1) Tugas

Melaksanakan Sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

### 2) Fungsi

- a) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga dinas
- b) Pengelolaan administrasi keuangan Dinas
- c) Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

### 3) Uraian Tugas

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja Subbagian-subbagian
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c) Mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas
- d) Mengoordinasikan penyusunan rencanan kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas;
- e) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsiapan, perpustakaan, perlengkapan rumah tanggaDinas
- f) Mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- h) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- i) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

#### 1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyusunan perencanaan Dinas dan Pengelolaan administrasi keuangan Dinas

#### 2) Uraian Tugas

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- b) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c) Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai dengan ketentuan Peraturan
- d) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- e) Menyusun profil dan laporan Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas
- h) Menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan
- i) Melaksanakan penendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas
- j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas
- k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- l) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- m) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **d. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

#### 1) Tugas

Melaksanakan Sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

#### 2) Uraian Tugas

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan

#### Kepegawaian

- b) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c) Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas
- d) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan Peraturan Perundang-undangan
- e) Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal
- f) Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepegawaian (DUK), nominative pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian
- g) Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- i) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- j) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

- 1) Tugas  
Melaksanakan Sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Fungsi
  - a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  - b) Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
  - c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- 3) Uraian Tugas
  - a) Merumuskan program kerja dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  - b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
  - c) Merumuskan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- d) Mengoordinasikan informasi dan dokumentasi dari semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya
- e) Menyelenggarakan kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- f) Menyelenggarakan Layanan Publikasi Kehumasan
- g) Melakukan fasilitas pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan eksternal
- h) Menyediakan dan memberikan layanan informasi dan komunikasi publik yang menjadi cakupan kerjanya
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- j) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang Informaso dan Komunikasi Publik
- k) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**f. Seksi Informasi Publik**

- 1) Tugas  
Melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibidang komunikasi publik
- 2) Uraian Tugas
  - a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Komunikasi Publik;
  - b) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
  - c) Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang komunikasi publik dan Kehumasan
  - d) Mengelola informasi dan dokumentasi dari semua PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya
  - e) mendokumentasi dan menverifikasi data informasi dari semua PPID Pembantu
  - f) menyusun rencana kerja dan laporan dalam rangka audit komunikasi publik dan kehumasan
  - g) menyelenggarakan pelayanan informasi publik baik tertulis maupun lisan tentang kebijakan pemerintahan melalui media massa cetak dan elektronik
  - h) melaksanakan pengawasan dan penelitian terhadap bahan informasi, baik berupa naskah tertulismaupun rekaman yang akan disebarluaskan kepada masyarakat
  - i) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Komunikasi Publik
  - j) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Komunikasi Publik

- k) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**g. Seksi Komunikasi Publik**

1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibidang komunikasi publik

2) Uraian Tugas

- a) menyusun program kerja dan anggaran Seksi Komunikasi Publik
- b) membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c) menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang komunikasi publik dan Kehumasan
- d) mengelola informasi dan dokumentasi dari semua PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya
- e) mendokumentasi dan menverifikasi data informasi dari semua PPID Pembantu
- f) menyusun rencana kerja dan laporan dalam rangka audit komunikasi publik dan kehumasan
- g) menyelenggarakan pelayanan informasi publik baik tertulis maupun lisan tentang kebijakan pemerintahan melalui media massa cetak dan elektronik
- h) melaksanakan pengawasan dan penelitian terhadap bahan informasi, baik berupa naskah tertulismaupun rekaman yang akan disebarluaskan kepada masyarakat
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Komunikasi Publik
- j) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Komunikasi Publik
- k) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

**h. Bidang Aplikasi dan Informatika**

1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Aplikasi dan Informatika

2) Fungsi

- a) penyusunan kebijakan teknis dibidang Aplikasi dan Informatika
- b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

## kegiatan Bidang Aplikasi Dan Informatika

- 3) Uraian Tugas
  - a) menyusun program kerja dan anggaran Bidang Aplikasi dan Informatika
  - b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
  - c) merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi dan pengelolaan E-Government dan aplikasi
  - d) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Dan Teknologi Informasidan Seksi Pengelolaan E-Government Dan Aplikasi
  - e) memberikan dukungan data elektronik, sarana prasarana dan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi kelancaran kegiatan Dinas
  - f) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Aplikasi Dan Informatika
  - g) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
  - h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **i. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

- 1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Aplikasi Dan Informatika dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi
- 2) Uraian Tugas
  - a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
  - b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
  - c) Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi
  - d) Memfasilitasi, mengembangkan, mengelola dan memelihara infrastruktur dan Teknologi Informasi
  - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
  - f) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
  - g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
  - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**j. Seksi Pengelolaan E-Government dan Aplikasi**

1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Aplikasi Dan Informatika dibidang pengelolaan e-government dan aplikasi

2) Uraian Tugas

- a) menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengelolaan E-Government Dan Aplikasi
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c) menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan e-government dan aplikasi
- d) melaksanakan pemantauan penggunaan sistem informasi perangkat lunak dilingkungan Pemerintah Daerah
- e) melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem informasi perangkat lunak dalam rangka implementasi e-government
- f) melaksanakan fasilitasi dan kerjasama, keamanan sistem informasi, perangkat lunak dan transaksi elektronik
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan E-Government dan Aplikasi
- h) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan E-Government dan Aplikasi
- i) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**k. Bidang Persandian dan Statistik**

1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Persandian dan Statistik

2) Fungsi

- a) perumusan kebijakan teknis dibidang Persandian dan Statistik
- b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian Dan Statistik

3) Uraian Tugas

- a) merumuskan program kerja dan anggaran Bidang Persandian dan Statistik
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c) merumuskan kebijakan teknis dibidang persandian dan statistik

- d) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik
- e) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik
- f) merumuskan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Persandiandan Statistik
- g) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **I. Persandian**

##### **1) Tugas**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Persandian Dan Statistik dibidang persandian

##### **2) Uraian Tugas**

- a) menyusun program kerja dan anggaran Seksi Persandian
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c) menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang persandian
- d) menyusun pedoman teknis operasional pengamanan jaringan komunikasi sandi (JKS)
- e) melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak persandian dan telekomunikasi
- f) melaksanakan pengelolaan dan pengamanan komunikasi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
- g) melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara
- h) melaksanakan pengelolaan berita sandi, surat kawat
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Persandian
- j) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Persandian
- k) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **m. Seksi Statistik**

##### **1) Tugas**

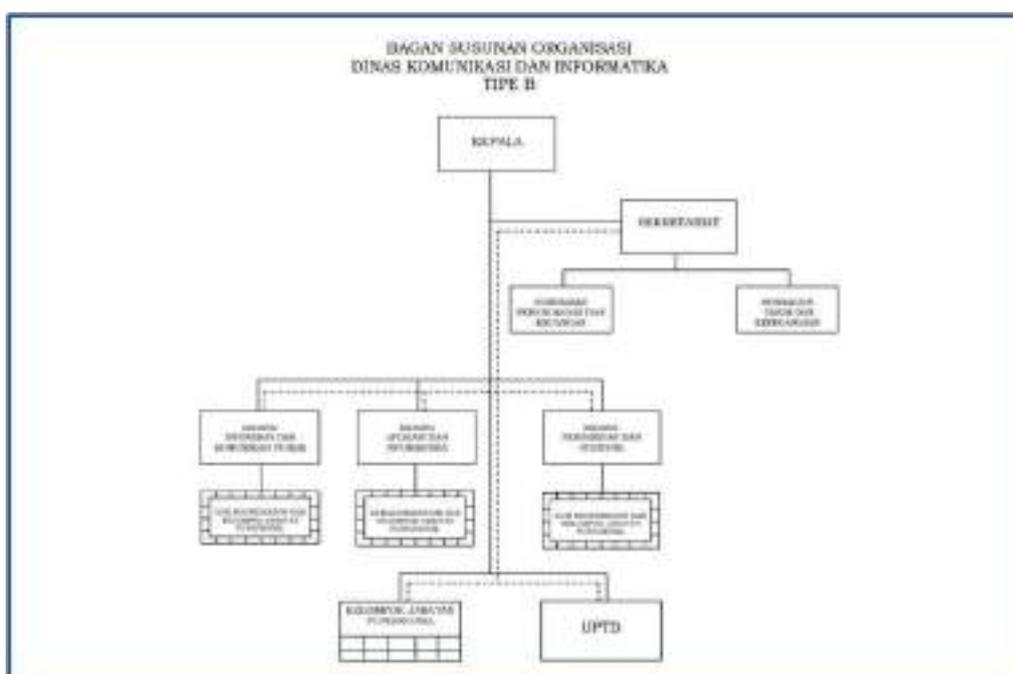
Melaksanakan sebagian tugas Bidang Persandian dan Statistik dibidang statistik

##### **2) Uraian Tugas**

- a) menyusun program kerja dan anggaran Seksi Statistik
- b) membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan

- c) menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang statistik
- d) menyusun statistik pembangunan Daerah
- e) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik
- f) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik; Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

**Gambar 1.1**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKA**



*Sumber: Peraturan Bupati Semarang No. 110 Tahun 2021*

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 , sebagai berikut:

### a. Ketersediaan SDM Dinas Komunikasi dan Informatik

Jumlah SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebanyak 58 orang, terdiri dari PNS sebanyak 27 orang, PPPK sebanyak 11 orang dan tenaga Non ASN sebanyak 20 orang.

**Tabel 1.1**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024**

No	Jenis Jabatan	Total
1.	Jabatan Struktural (PNS)	7 Orang
2.	Jabatan Fungsional	
	PNS	8 Orang
	PPPK	10 Orang
3.	Pelaksana (PNS)	13 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>38 Orang</b>

*Sumber: SIBKD Diskominfo Kab. Semarang*

Tabel di atas menunjukkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang beragam, masing-masing personel memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Semarang.

### 3. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang didukung dengan berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas perlengkapan lain, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2024**

No	Nama	Jumlah	Harga
1	ELECTRIC GENERATING SET	11	334.242.485
2	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7	1.356.336.259
3	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	11	179.188.951
4	ALAT ANGKUT TAK BERMESIN/ ANGKUTAN BARANG	1	3.000.000
5	PERKAKAS KONTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	1	793.779
6	STANDARD TOOL	1	423.910
7	PERKAKAS BENGKEL KERJA	1	650.000
8	PERALATAN TUKANG BESI	2	2.472.593
9	ALAT UKUR UNIVERSAL	5	20.704.795

No	Nama	Jumlah	Harga
10	ALAT UKUR INTELEGENSIA	3	1.963.546
11	ALAT UKUR PEMBANDING	4	5.123.079
12	MESIN TIK	2	26.878.000
13	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	53	139.901.507
14	ALAT KANTOR LAINNYA	38	373.794.451
15	MEUBELAIR	150	262.865.734
16	ALAT PEMBERSIH	2	4.313.190
17	ALAT PENDINGIN	33	184.237.742
18	ALAT DAPUR	1	4.029.500
19	HOMEUSE	772	1.969.163.137
20	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	2	13.695.380
21	MEJA KERJA PEJABAT	9	27.731.300
22	MEJA RAPAT PEJABAT	6	17.430.000
23	KURSI KERJA PEJABAT	11	21.816.000
24	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	3	11.319.000
25	PERALATAN STUDIO AUDIO	38	215.575.892
26	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	54	631.121.815
27	PERALATAN STUDIO PEMETAAN UKUR	2	56.750.000
28	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI /TELEPONE	141	341.686.889
29	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI/ RADIO UHF	35	207.150.000
30	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI/ SOSIAL	1	2.900.000
31	ALAT-ALAT SANDI	8	11.500.000
32	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVESIONAL	1	24.500.000
33	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI PERALATAN PEMANCAR HF/ SW	4	94.332.833
34	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI/PEMANCAR VHF FM	1	91.700.000
35	PERALATAN PEMANCAR SHF	1	57.000.000
36	PERALATAN ANTENA MF/MW	1	39.250.000
37	PERALATAN ANTENA UHF	2	9.700.000
38	PERALATAN ANTENA SHS/PARABOLA	1	58.500.000
39	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	68	69.735.024
40	SWITCHER/MENARA ANTENA	1	4.850.000
41	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	6	71.460.000
42	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	1	4.580.000
43	SUMBER TENAGA	1	5.633.434
44	ALAT KEAMANAN	7	84.360.000
45	KOMPUTER JARINGAN	1	1.465.712
46	PERSONAL KOMPUTER	140	1.525.533.272

No	Nama	Jumlah	Harga
47	PERALATAN KOMPUTER MAINFRAME	6	24.213.411
48	PERALATAN MINI KOMPUTER	6	22.445.000
49	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	85	314.963.977
50	PERALATAN JARINGAN	713	2.954.145.772
51	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4	2.026.128.000
52	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	5	14.500.000
53	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	10	276.915.355
54	PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	1	27.574.957
55	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	56.909.375
56	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	1	7.657.628
57	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	1	8.855.696
58	INSTALASI LAINNYA	2	40.840.000
59	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	7	131.125.064
60	JARINGAN TELEPON DI ATAS TANAH	10	339.237.499
61	JARINGAN TELEPON DI BAWAH TANAH	4	842.721.706
62	JARINGAN PIPA DINAS	1	14.800.236
63	SIM Menara Telekomunikasi	1	50.158.000
64	Website Kecamatan	19	62.213.631
65	Aplikasi Dashboard	1	39.150.000
66	Aplikasi PATEN	1	48.250.000
67	Aplikasi Sistem Informasi Peng Infra	1	48.425.000
68	Aplikasi SME	1	19.100.000
69	Aplikasi Aset Digital	1	39.780.000
70	Aplikasi Integrasi Dashboard Mobile	1	32.300.000
71	Aplikasi PPID Pembantu	1	30.332.500
72	Aplikasi Statistik	1	20.750.000
73	Aplikasi Dashboard	1	75.270.000

## B. Tujuan dan Sasaran

Visi Bupati Semarang dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2021 - 2026 yaitu:

**“BERSATU. BERDAULAT. BERKEPRIBADIAN. SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI) DENGAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA”**

Penjabaran dari visi sebagai berikut:

**Bersatu**

Bersatu bermakna bersama-sama saling menyatu tanpa memandang ciri ras, suku, agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.

**Berdaulat**

Berdaulat bermakna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat

**Berkepribadian**

Berkepribadian bermakna masyarakat yang berkepribadian dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya.

**Sejahtera**

Sejahtera bermakna mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.

**Mandiri**

Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Dengan semangat gotong-royong, berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan bertanggungjawab didukung oleh aparatur yang berkompeten dan profesional.

4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah. penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026, maka tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata Pemerintahan berbasis E-Government
2. Meningkatkan pemanfaatan data Statistik Sektoral
3. Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang tersebut diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi Publik
2. Meningkatnya tata Kelola SPBE
3. Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat
4. Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah

### **C. Permasalahan Strategis**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dititikberatkan pada isu strategis sebagai berikut:

1. Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika :
  - a) Program aplikasi dan informatika

- Permasalahan

- 1) SPBE

Permasalahan dalam pelaksanaan SPBE yaitu belum terpadunya antara perencanaan dengan penganggaran SPBE. Perangkat Daerah belum secara menyeluruh berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam proses penganggaran belanja TIK. Belanja TIK berjalan tanpa adanya keterpaduan dengan Peta Rencana SPBE.

Selain belum adanya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, Peta Proses Bisnis sebagai acuan dalam pengintegrasian data masih belum tersusun sehingga tidak dapat melakukan inovasi proses bisnis.

Kendala lain dalam pelaksanaan SPBE yang belum dilaksanakannya Audit Keamanan, Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi, sehingga pencapaian indikator Audit SPBE masih rendah.

- 2) Smart City

Implementasi smart city telah dilaksanakan namun dalam evaluasinya belum dapat memberikan data dukung berupa dokumentasi yang menjadi bukti bahwa smart city telah dilaksanakan sesuai masterplan smart city.

Selain itu saat proses penganggaran belum mampu menandai program/kegiatan pendukung smart city sehingga tidak diketahui total jumlah anggaran dalam mendukung smart city.

Inovasi-inovasi yang ada belum dapat menumbuhkan implementasi smart city di Kabupaten Semarang.

- 3) Integrasi Data

Kendala integrasi disebabkan oleh Perangkat Daerah belum secara menyeluruh memiliki data elektronik, meskipun ada namun belum tersedia mekanisme berbagi pakai data antar sistem elektronik. Selain disebabkan kurangnya SDM dengan kompetensi berbagi pakai data, Perangkat Daerah belum memiliki Rencana pengembangan sistem elektronik yang masuk dalam Peta Rencana SPBE. Proses pengembangan sistem elektronik masih bergantung dengan pihak ketiga tanpa didukung SDM yang mampu melaksanakan

pengembangan sistem elektronik tersebut secara berkelanjutan. SDM Pranata Komputer yang ada di Perangkat Daerah belum memiliki kompetensi untuk melakukan berbagai pakai data.

#### 4) Pelatihan SDM

Kendala pelatihan SDM dikarenakan tidak semua perangkat yang digunakan selama pelatihan dapat berjalan optimal. Selain itu, belum tersedia rencana pengembangan kompetensi SDM khususnya dalam mendukung SPBE dan Smart City.

#### 5) Fasilitasi Kegiatan

Peralatan pendukung fasilitasi kegiatan belum mampu memberikan fasilitasi streaming yang membutuhkan konektivitas dan media transmisi berkualitas tinggi. Peralatan masih menggunakan pengkabelan sehingga terbatas pada ruang jangkauan yang tidak terlalu luas. Selain itu, peralatan yang dimiliki sudah menurun kualitasnya.

#### 6) Jaringan

Lokasi perkantoran yang cukup jauh dan kondisi kontur wilayah yang luas menyebabkan tidak semua Perangkat Daerah dapat dijangkau jaringan intra berbasis fiber optic. Penggunaan perangkat wireless masih rawan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh petir dan cuaca.

#### 7) Bandwidth/layanan internet

Layanan internet telah menjangkau semua Perangkat Daerah namun dengan kuantitas yang masih terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh kuantitas bandwidth yang dianggarkan terbatas. Dengan kondisi tersebut, penganggaran bandwidth tersebar di Perangkat Daerah dan tidak terpusat di Dinas Kominfo sehingga tidak dapat dikontrol penggunaannya serta tidak ada koordinasi dalam pengadaan belanja bandwidth pada Perangkat Daerah.

- Solusi

- Telah dilakukan koordinasi dengan Badan Perencana agar seluruh OPD di Kabupaten Semarang melakukan koordinasi/ permohonan rekomendasi teknis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal perencanaan dan penganggaran TIK untuk setiap tahunnya.

- Untuk pelaksanaan Audit TIK, Dinas Kominfo telah berkoordinasi dengan inspektorat untuk pelaksanaan audit di tahun berikutnya.
- Dinas Kominfo telah melaksanakan pelatihan TIK dengan persyaratan peserta yaitu personil yang menangani TIK pada Perangkat Daerah (Pranata Komputer). Selain itu Dinas Kominfo telah melakukan koordinasi dengan seluruh perwakilan Pranata Komputer di Kabupaten Semarang dan telah disampaikan bahwa pranata computer merupakan kepanjangan tangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan TIK di Perangkat Daerah masing-masing;
- Dalam pelaksanaan pelatihan TIK, Dinas Kominfo telah merencanakan Pelatihan TIK yang berkelanjutan, diawali dengan review pelatihan pada tahun sebelumnya, bekerjasama dengan instansi vertikal maupun pihak-pihak yang memiliki Tenaga Ahli untuk pelaksanaan pelatihan TIK bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang;
- Guna mendukung perluasan jaringan fiber optic, Dinas Kominfo telah menyusun rencana perluasan jaringan fiber optic dan telah melaksanakan pengembangannya secara bertahap untuk menjangkau Perangkat dengan jarak terdekat dari titik terakhir. Di tahun 2024 ini telah dibangun perluasan jaringan fiber optic yang menjangkau Kelurahan Karangjati dan Kelurahan Ngempon;
- Dinas Kominfo Melaksanakan pedampingan pengadaan perangkat jaringan yang digunakan oleh Perangkat Daerah agar koneksi jaringan lebih stabil pada beberapa Perangkat Daerah yang telah berkoordinasi dalam rangka penguatan jaringan internalnya;
- Perluasan jaringan fiber optic telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- Menggunakan biaya yang telah dianggarkan, Dinas Kominfo telah memaksimalkannya untuk mendapatkan kapasitas dan kualitas bandwidth yang lebih baik dari tahun sebelumnya meskipun belum secara keseluruhan terpusat di Dinas Kominfo;
- Fasilitasi streaming kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik

dengan peralatan yang tersedia, namun masih membutuhkan penguatan perangkat fasilitasi kegiatan yang terkini dan mampu menjangkau area yang lebih luas dan tanpa kabel (wireless) khususnya untuk fasilitasi kegiatan di malam hari;

- Dinas Kominfo telah memilih penyedia layanan Internet (Internet Service Provider) yang berkualitas dan memiliki jaringan sendiri hingga ke Dinas Kominfo untuk mendapatkan layanan internet yang lebih baik, stabil, dan aman.

b) Program Komunikasi dan Informasi Publik.

- Permasalahan

- Terbatasnya anggaran untuk kegiatan PPID dan Kanal Pengaduan maupun sarana penyebarluasan informasi sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang maksimal
- Terbatasnya personil yang berkompeten di bidang IT untuk mengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing PPID Pelaksana dan Pengelolaan kanal pengaduan dan Jurnalistik.
- Terbatasnya Tenaga Penyiar radio dan Tenaga IT radio.
- Sering terjadinya pergantian staf/petugas/admin yang menangani PPID maupun kanal Pengaduan
- Belum semua PPID Pelaksana membuat Daftar Informasi Publik dikarenakan Masih banyaknya Pejabat Badan Publik yang belum paham tugas pokok dan fungsinya, hal ini sangat terkait sekali dengan dokumen yang dihasilkan
- Terdapat beberapa PD yang masih menganggap keterbukaan informasi public belum penting.

- Solusi

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID pelaksana dan PPID Desa dan pada tahun anggaran 2025,
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Kanal Pengaduan tahun anggaran 2025
- Meningkatkan kualitas website dan media social PPID kabupaten Semarang

- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala kepada seluruh PPID Pelaksana dan pengelola kanal pengaduan dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi public
- Perlu adanya tambahan SDM yang menguasai IT dan penambahan Penyiar radio
- Perlu adanya pengadaan sarana prasarana penyebarluasan informasi

c) Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Permasalahan

- Belum memadainya tools dan pemenuhan kapasitas SDM serta keikutsertaan dalam sertifikasi Keamanan Informasi Seksi Persandian
- Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) belum maksimal dikarenakan belum memiliki JFT Manggala Informatika, sampai saat ini pelaksanaan SMKI masih ditangani oleh Sandiman yang ada sehingga tata kelola dan manajemen risiko keamanan informasi belum optimal.

- Solusi

- Terpenuhinya sebagian kapasitas SDM dan penganggaran yang memadai untuk mewujudkan sistem keamanan informasi di Kabupaten Semarang.
- Sudah mengajukan usulan JFT Manggala Informatika untuk optimalisasi pelaksanaan SMKI di 2024, namun belum mendapatkan kuota di penerimaan CPNS dan PPPK di 2024.
- Terfasilitasinya tools sebagai penunjang keamanan informasi serta pengoptimalan kapasitas SDM.

d) Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Permasalahan

- Belum ada JFT Statistisi maupun SDM yang berkompeten di bidang statistic sehingga pelaksanaan tugas belum optimal karena belum ada yang memiliki basic pendidikan Statistik
- Terkait SDM yang menangani spasial belum ada JFT Surveyor Pemetaan sesuai arahan BIG selaku pembina Data Spasial
- Sarana prasarana seperti computer dan printer belum memadai serta

cloud untuk penyimpanan online belum tersedia.

- Unsur-unsur dalam Penyelenggara SDI masih belum maksimal dalam pelaksanaan tugas masing-masing
- Solusi
  - Upaya dalam mengatasi permasalahan urusan statistik yaitu sudah mengusulkan penambahan JFT Statistisi dan mendapatkan kuota di 2024, diharapkan bisa bergabung di 2025, selain itu juga masih diperlukan penambahan JFT Surveyor Pemetaan untuk Data Spasial.
  - Diharapkan di tahun berikutnya dapat terfasilitasi sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan penyusunan kegiatan statistic

Selain itu diperlukan komitmen dari setiap OPD untuk dapat memberikan data yang sesuai dengan standar data. Diharapkan kedepannya Koordinasi dapat berjalan lebih baik, dengan setiap Penyelenggaran SDI dalam hal pemenuhan kebutuhan data supaya dapat tersusun sesuai jadwal.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2024**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perangkat daerah</b>	Nilai LKJIP	51,87 nilai						
1	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	100,00 %	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100 %	4.341.055.600	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perangkat daerah		DAERAH KABUPATEN/KOTA	perkantoran Perangkat Daerah				
2				2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	13 dokumen	36.042.200		
3				2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.637.326.300		
4				2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang tertib dan baik.	tahun	25.032.500		
5					Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang tertib dan baik.	tahun			

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6					Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	2 jenis			
7				2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	172.137.500		
8				2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 jenis	390.516.600		
9				2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	80.000.500		
	<b>Meningkatkan kualitas pengelolaan tata pemerintahan berbasis e-government</b>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25 nilai						
10	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan	Indeks tata kelola SPBE	3.40 nilai	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Infrastruktur jaringan terkoneksi dengan baik	100 %	1.747.643.700	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Berbasis Elektronik (SPBE)				Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar	100 %			
12				2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	77 titik	228.422.150		
13				2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah	5 kegiatan	1.519.221.550		
14	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	100,00 %	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keterbukaan informasi publik	100 %	1.400.345.300	Dinas Komunikasi dan Informatika	
15				2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	100 %	1.400.345.300		
	<b>Meningkatkan pemanfaatan</b>	Persentase kemanfaatan	100 %						

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>data statistik sektoral</b>	data statistik sektoral							
16	Meningkatnya kemudahan akses data statistik sektoral bagi masyarakat	Persentase ketersediaan informasi statistik sektoral yang dapat diakses masyarakat	100,00 %	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar	100 %	259.592.400	Dinas Komunikasi dan Informatika	
17				2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statistik sektoral yang dipublikasikan	8 Buku	259.592.400		
	<b>Meningkatkan pengelolaan persandian dan pengaman informasi</b>	Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan	100 %						
18	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku	100,00 %	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dan Pengamanan Informasi	100 %	374.450.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
19				2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian	46 OPD	310.900.000		

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20				2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang tergabung dalam forum pengamanan informasi	46 OPD	63.550.000		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Semarang

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2024**

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Target Kinerja (Perubahan)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan tata	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	3,25

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Target Kinerja (Perubahan)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan berbasis E-Government			
2	Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	Persentase jumlah pengelolaan informasi, aduan dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	100%	100%
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks Tata Kelola SPBE	3,4	3,4
4	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Sektoral	Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral	100%	100%
5	Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat	Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat	100%	100%
6	Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan	100%	100%
7	Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Persentase pengamanan Informasi sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%
8	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Skor SAKIP Perangkat Daerah	51,86	71,62
9	Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%

Tabel II

No	Indikator Kinerja	Program	Target Anggaran	Target Anggaran (Perubahan)
1	2	3	4	5
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.759.788.700	1.747.643.700
2	Indeks Tata Kelola SPBE			
3	Persentase jumlah pengelolaan informasi, aduan dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.418.553.800	1.400.345.300
4	Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	263.336.900	259.592.400

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Target Kinerja (Perubahan)
1	2	3	4	5
5	Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat			
6	Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	379.775.000	374.450.000
7	Persentase pengamanan Informasi sesuai peraturan yang berlaku			
8	Skor SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.286.025.600	4.341.055.600
9	Prosentase capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah		8.107.480.000	8.123.087.000

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Semarang

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang 2021 - 2026. Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Untuk mempermudah intepretasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran dalam penilaian kinerja digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perangkat daerah	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan tata pemerintahan berbasis e-government	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	nilai	3,4	3,00	88,24	Tinggi
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	%	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	Meningkatnya kemudahan akses data statistik sektoral bagi masyarakat	Persentase ketersediaan informasi statistik sektoral yang dapat diakses masyarakat	%	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	100	Sangat Tinggi

## B. Evaluasi Kinerja

### Tujuan 1 : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perangkat daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Skor Evaluasi SAKIP	Skor	51,87	71,82	138%	BB

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen perangkat daerah. Capaian skor evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 telah memenuhi target. Target tahun 2024 sebesar 51,87 terealisasi sebesar 71,82 dengan persentase capaian kinerja mencapai 138% dan kategori “BB”.

### Sasaran 1.1: Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	%	100	100	100 %	Sangat Tinggi

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah. Capaian persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tahun 2024 sudah/belum memenuhi target. Target tahun 2024 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja mencapai 100.% dan kategori “Sangat Tinggi”.

### Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pengelolaan tata pemerintahan berbasis e-government

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	3,25	3,31	101,84 %	Sangat Tinggi

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jika dilihat pada tahun 2024 ditetapkan target 3,25 dan realisasi yang didapatkan sebesar 3,31 atau pencapaiannya sebesar 101,84%. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 3,26. Capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai sudah optimal dikarenakan telah dapat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,25.

**Sasaran 2.1: Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks tata kelola SPBE	nilai	3,4	3,0	88,24 %	Tinggi

Indeks Tata Kelola SPBE pada tahun 2024 ditetapkan target 3.4. Saat ini nilai Indeks Tata Kelola SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang hasil dari penilaian Kemenpan RB yaitu 3.0. Indeks tata Kelola SPPBE saat ini masih di bawah target dengan pencapaian sebesar 88.24%.

Penilaian Domain Tata Kelola SPBE terdiri dari unsur penilaian Perencanaan Strategis SPBE yaitu dengan nilai 2.5, Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan nilai 3.5, dan unsur penyelenggara SPBE dengan nilai 3.5.

Terlihat bahwa unsur yang masih di bawah target yaitu unsur penilaian rencana strategis. Hal ini disebabkan Pemerintah Kab. Semarang masih belum memiliki Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE serta Inovasi Proses Bisnis SPBE.

Untuk memperbaiki indeks Tata Kelola SPBE tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda untuk penyusunan Proses Bisnis, serta telah berkoordinasi dengan Bapperida untuk Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE.

**Sasaran 2.2 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	%	100	100	100 %	Sangat Tinggi

Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100 %. Untuk pencapaian realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Dengan rumus perhitungan jumlah informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses / jumlah informasi aduan dan desiminasi yang masuk atau sebesar  $352/352 * 100\% = 100\%$ . Sebanyak 352 aduan tersebut terdiri dari 193 aduan lapor gubernur, 118 aduan lapor bupati dan 41 aduan dari SP4N Lapor.

**Tujuan 3: Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase pemanfaatan data statistik sektoral	%	100	100	100 %	Sangat Tinggi

Persentase pemanfaatan data statistik sektoral ditetapkan target sebesar 100%. Realisasi yang didapatkan tahun ini juga 100%. Dengan perhitungan total data yang dimanfaatkan dibagi total elemen data atau sebesar  $3.970 / 3.970 * 100\% = 100\%$

**Sasaran 3.1: Meningkatnya kemudahan akses data statistik sektoral bagi masyarakat**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase ketersediaan informasi statistik sektoral yang dapat diakses masyarakat	%	100	100	100 %	Sangat Tinggi

Persentase ketersediaan informasi statistik sektoral ditetapkan target sebesar 100%. Realisasi yang didapatkan sebesar 100% dengan perhitungan jumlah data statistik sektoral yang bisa diakses dibagi total informasi yang ada. Yaitu sebesar  $3.970 / 3.970 * 100\% = 100\%$

**Tujuan 4: Meningkatkan pengelolaan persandian dan pengamanan informasi**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase konten informasi pemerintah daerah yang diamankan	%	100	100	100 %	Sangat Tinggi

Persentase konten informasi pemerintah daerah yang diamankan ditetapkan target sebesar 100%. Realisasi yang didapatkan yaitu sebesar 100% dengan rincian jumlah konten informasi yang diamankan dibagi total informasi yang ada atau sebesar  $50/50 * 100\% = 100\%$ . Dengan penjelasan 50 itu terdiri dari 46 itu adalah sistem aplikasi yang dimiliki pemda dan 4 informasi (berkala, serta merta, setiap saat, dikecualikan)

**Sasaran 4.1: Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	100 %	Sangat Tinggi

Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku ditetapkan target sebesar 100%. Realisasi yang didapatkan yaitu 100 % dengan perhitungan jumlah informasi yang diamankan dibagi total informasi yang ada atau sebesar  $46 / 46 * 100\% = 100\%$ . Dengan penjelasan 46 adalah jumlah informasi sesuai jumlah OPD.

Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2022 dan 2023 serta target ditahun akhir Renstra 2021 - 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target 2026 (Akhir Renstra)	%Capaian Tahun 2023 terhadap Target 2026 (Akhir Renstra)
		2023	2024	2023	2024					
<b>Skor Evaluasi Sakip</b>	skor	51,86	51,87	62,18	71,62	51,87	71,62	138%	51,88	119,85%
Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	nilai	3,12	3,25	2,13	3,26	3,25	3,31	101,84%	3,40	62,64%
Persentase jumlah pengelolaan informasi, aduan dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Tata Kelola SPBE	nilai	3,00	3,40	1,60	2,70	3,40	3,00	88,24%	3,70	43,24%
<b>Persentase pemanfaatan data Statistik Sektoral</b>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target 2026 (Akhir Renstra)	%Capaian Tahun 2023 terhadap Target 2026 (Akhir Renstra)
		2023	2024	2023	2024					
diakses masyarakat										
<b>Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramanakan</b>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pengaman Informasi sesuai peraturan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Semarang

Capaian kinerja Skor Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 71,62 dibanding tahun sebelumnya (Tahun 2022: 63,01 , Tahun 2023: 62,18 ). Sedangkan untuk persentase capaian kinerja tahun 2024 terhadap target tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 138%. Target akhir Renstra tahun 2026 optimis tercapai.

Permasalahan dalam pencapaian target yaitu belum optimalnya implementasi SAKIP dikarenakan masih terdapat unsur perangkat daerah yang belum memahami tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target antara lain:

1. Mengesahkan / menandatangani dokumen pendukung Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Menyusun LKjIP sesuai dengan format pelaporan Lampiran II MenpanRB Nomor 53 Tahun 2014
3. Melakukan evaluasi internal secara berkala dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Faktor pendukung dalam pencapaian target antara lain:

1. Dokumen perencanaan telah disusun dan diformalkan dengan baik dan telah memiliki dokumen Renstra, Renja dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah
2. Dalam melakukan pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilaksanakan secara berjenjang dan baik.

Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2022 dan 2023 serta target ditahun akhir Renstra 2021 - 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target Realisasi				Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target 2026 (Akhir Renstra)	%Capaian Tahun 2022 terhadap Target 2026 (Akhir Renstra)
		2023	2024	2023	2024					
Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Capaian kinerja persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sejak tahun 2022 - 2024 sangat fluktuatif (Tahun 2022: 100 %, Tahun 2023: 100 %, Tahun 2024: 100 %). Sedangkan untuk persentase capaian kinerja tahun 2024 terhadap target tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100 %. Target tahun 2026 (akhir Renstra) optimis tercapai.

Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dihitung berdasarkan rata-rata ketercapaian IKU Perangkat Daerah yang merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE)
2. Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi yang bisa diakses masyarakat
3. Indeks Tata Kelola
4. Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral
5. Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat
6. Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan
7. Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain:

1. Program aplikasi dan informatika

- Permasalahan

- SPBE

Permasalahan dalam pelaksanaan SPBE yaitu belum terpadunya antara perencanaan dengan penganggaran SPBE. Perangkat Daerah belum secara menyeluruh berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam proses penganggaran belanja TIK. Belanja TIK berjalan tanpa adanya keterpaduan dengan Peta Rencana SPBE.

Selain belum adanya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, Peta Proses Bisnis sebagai acuan dalam pengintegrasian data masih belum tersusun sehingga tidak dapat melakukan inovasi proses bisnis.

Kendala lain dalam pelaksanaan SPBE yang belum dilaksanakannya Audit Keamanan, Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi, sehingga pencapaian indikator Audit SPBE masih rendah.

- Smart City

Implementasi smart city telah dilaksanakan namun dalam evaluasinya belum dapat memberikan data dukung berupa dokumentasi yang menjadi bukti bahwa smart city telah dilaksanakan sesuai masterplan smart city.

Selain itu saat proses penganggaran belum mampu menandai program/kegiatan pendukung smart city sehingga tidak diketahui total jumlah anggaran dalam mendukung smart city.

Inovasi-inovasi yang ada belum dapat menumbuhkan implementasi smart city di Kabupaten Semarang.

- Integrasi Data

Kendala integrasi disebabkan oleh Perangkat Daerah belum secara menyeluruh memiliki data elektronik, meskipun ada namun belum tersedia mekanisme berbagi pakai data antar sistem elektronik. Selain

disebabkan kurangnya SDM dengan kompetensi berbagi pakai data, Perangkat Daerah belum memiliki Rencana pengembangan sistem elektronik yang masuk dalam Peta Rencana SPBE. Proses pengembangan sistem elektronik masih bergantung dengan pihak ketiga tanpa didukung SDM yang mampu melaksanakan pengembangan sistem elektronik tersebut secara berkelanjutan. SDM Pranata Komputer yang ada di Perangkat Daerah belum memiliki kompetensi untuk melakukan berbagi pakai data.

- Pelatihan SDM  
Kendala pelatihan SDM dikarenakan tidak semua perangkat yang digunakan selama pelatihan dapat berjalan optimal. Selain itu, belum tersedia rencana pengembangan kompetensi SDM khususnya dalam mendukung SPBE dan Smart City.
- Fasilitasi Kegiatan  
Peralatan pendukung fasilitasi kegiatan belum mampu memberikan fasilitasi streaming yang membutuhkan konektivitas dan media transmisi berkualitas tinggi. Peralatan masih menggunakan pengkabelan sehingga terbatas pada ruang jangkauan yang tidak terlalu luas. Selain itu, peralatan yang dimiliki sudah menurun kualitasnya.
- Jaringan  
Lokasi perkantoran yang cukup jauh dan kondisi kontur wilayah yang luas menyebabkan tidak semua Perangkat Daerah dapat dijangkau jaringan intra berbasis fiber optic. Penggunaan perangkat wireless masih rawan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh petir dan cuaca.
- Bandwidth/layanan internet  
Layanan internet telah menjangkau semua Perangkat Daerah namun dengan kuantitas yang masih terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh kuantitas bandwidth yang dianggarkan terbatas. Dengan kondisi tersebut, penganggaran bandwidth tersebar di Perangkat Daerah dan tidak terpusat di Dinas Kominfo sehingga tidak dapat dikontrol penggunaannya serta tidak ada koordinasi dalam pengadaan belanja bandwidth pada Perangkat Daerah.

## 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik.

- Permasalahan
  - Terbatasnya anggaran untuk kegiatan PPID dan Kanal Pengaduan maupun sarana penyebarluasan informasi sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang maksimal
  - Terbatasnya personil yang berkompeten di bidang IT untuk mengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing PPID Pelaksana dan Pengelolaan kanal pengaduan dan Jurnalistik.
  - Terbatasnya Tenaga Penyiar radio dan Tenaga IT radio.
  - Sering terjadinya pergantian staf/petugas/admin yang menangani PPID maupun kanal Pengaduan

- Belum semua PPID Pelaksana membuat Daftar Informasi Publik dikarenakan masih banyaknya Pejabat Badan Publik yang belum paham tugas pokok dan fungsinya, hal ini sangat terkait sekali dengan dokumen yang dihasilkan
- Terdapat beberapa PD yang masih menganggap keterbukaan informasi public belum penting.

### 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Permasalahan
  - Belum memadainya tools dan pemenuhan kapasitas SDM serta keikutsertaan dalam sertifikasi Keamanan Informasi Seksi Persandian
  - Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ( SMKI ) belum maksimal dikarenakan belum memiliki JFT Manggala Informatika, sampai saat ini pelaksanaan SMKI masih ditangani oleh Sandiman yang ada sehingga tata kelola dan manajemen risiko keamanan informasi belum optimal.

### 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Permasalahan
  - Belum ada JFT Statistisi maupun SDM yang berkompeten di bidang statistic sehingga pelaksanaan tugas belum optimal karena belum ada yang memiliki basic pendidikan Statistik
  - Terkait SDM yang menangani spasial belum ada JFT Surveyor Pemetaan sesuai arahan BIG selaku pembina Data Spasial
  - Sarana prasarana seperti computer dan printer belum memadai serta cloud untuk penyimpanan online belum tersedia.
  - Unsur-unsur dalam Penyelenggara SDI masih belum maksimal dalam pelaksanaan tugas masing-masing

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kinerja secara berkala, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Faktor pendukung dalam pencapaian target yaitu adanya komitmen dari organisasi dalam pencapaian target IKU, adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan SDM yang memadai.

### C. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output / input* yang dikaitkan dengan standarkinerja atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2024**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi	Kategori
				Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perangkat daerah	Nilai LKJIP	nilai	51,87	71,62	138%					
1.1	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	%	100 %	100 %	100 %	4.341.055.600	4.248.257.674	97,86%	102,18 %	

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi	Kategori
				Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
2	<b>Meningkatkan kualitas pengelolaan tata pemerintahan berbasis e-government</b>	<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	nilai	3,25	3,31	101,84%					
2.1	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	nilai	3,4	3,0	88,24%	1.747.643.700	1.658.943.506	94,92%	92,96 %	
2.2	Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	%	100 %	100 %	100 %	1.400.345.300	1.356.369.493	96,86%	103,24 %	
3	<b>Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral</b>	<b>Persentase kemanfaatan data statistik sektoral</b>	%	100 %	100 %	100 %					
3.1	Meningkatnya kemudahan akses data statistik sektoral bagi masyarakat	Persentase ketersediaan informasi statistik sektoral yang dapat diakses masyarakat	%	100 %	100 %	100 %	259.592.400	236.209.016	90,99%	109,90 %	

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi	Kategori
				Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
4	Meningkatkan pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Persentase konten informasi pemerintah daerah yang diamankan	%	100 %	100 %	100 %					
4.1	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku	%	100 %	100 %	100 %	374.450.000	340.538.939	90,94%	109,96 %	

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa capaian kinerja dan efisiensi masing-masing sasaran bervariasi, sebagai berikut:

1. Sasaran 1.1 dengan presentase realisasi capaian kinerja 100 % berbanding dengan presentase realisasi keuangan 97,86 %, menghasilkan presentase efisiensi sebesar 102,18 %.
2. Sasaran 2.1 dengan presentase realisasi capaian kinerja 88,24 % berbanding dengan presentase realisasi keuangan 94,92 %, menghasilkan presentase efisiensi sebesar 92,96 %.
3. Sasaran 2.2 dengan presentase realisasi capaian kinerja 100 % berbanding dengan presentase realisasi keuangan 96,86 %, menghasilkan presentase efisiensi sebesar 103,24 %.
4. Sasaran 3.1 dengan presentase realisasi capaian kinerja 100 % berbanding dengan presentase realisasi keuangan 90,99 %, menghasilkan presentase efisiensi sebesar 109,90 %.
5. Sasaran 4.1 dengan presentase realisasi capaian kinerja 100 % berbanding dengan presentase realisasi keuangan 90,94 %, menghasilkan presentase efisiensi sebesar 109,96 %.

Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang telah dilakukan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang tahun 2024 antara lain :

1. Perencanaan anggaran yang tepat
2. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran

Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi efisiensi anggaran, antara lain:

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran bersama seluruh pejabat struktural pelaksana.
2. Melakukan koordinasi rutin dan kolaborasi yang baik antar bidang pelaksana.

**Tabel 3.4**  
**Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Diskominfo**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2024**

Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Analisis Kegagalan/ Keberhasilan	Upaya/ solusi yang dilakukan
Nilai LKJIP	138%					
Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	100%	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100%		
		2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	100%		
		2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		
		2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	100%		
		2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%		
		2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%		

Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Analisis Kegagalan/ Keberhasilan	Upaya/ solusi yang dilakukan
		2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	101,84 %					
Indeks tata kelola SPBE	88,24%	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Infrastruktur jaringan terkoneksi dengan baik	100%	Dinas Kominfo telah memilih penyedia layanan Internet (Internet Service Provider) yang berkualitas dan memiliki jaringan sendiri hingga ke Dinas Kominfo untuk mendapatkan layanan internet yang lebih baik, stabil, dan aman.	
			Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar	100%		
		2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	100%		
		2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah	100%		

Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Analisis Kegagalan/ Keberhasilan	Upaya/ solusi yang dilakukan
Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	100%	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keterbukaan informasi publik	100%	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala kepada seluruh PPID Pelaksana dan pengelola kanal pengaduan dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik	
		2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	100%		
Persentase pemanfaatan data statistik sektoral	100%					
Persentase ketersediaan informasi statistik sektoral yang dapat diakses masyarakat	100%	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar	100%	Mengusulkan penambahan JFT Statistisi dan mendapatkan kuota di 2024, diharapkan bisa bergabung di 2025, selain itu juga masih diperlukan penambahan JFT Surveyor Pemetaan untuk Data Spasial.	
		2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statistik sektoral yang dipublikasikan	100%		
Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan	100%					

Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Analisis Kegagalan/ Keberhasilan	Upaya/ solusi yang dilakukan
Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku	100%	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dan Pengamanan Informasi	100%	Terpenuhinya sebagian kapasitas SDM dan penganggaran yang memadai untuk mewujudkan sistem keamanan informasi di Kabupaten Semarang.	
		2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian	100%		
		2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang tergabung dalam forum pengamanan informasi	100%		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Semarang

Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024 didukung oleh 5 program dan 12 kegiatan.

1. Sasaran 1.1 Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan, terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Sasaran 2.1 Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika ;

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Sasaran 2.2 Meningkatnya keterbukaan informasi Publik didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ;

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Sasaran 3.1 Meningkatnya kemudahan akses data statistik sektoral bagi masyarakat didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan, terdiri dari:
  1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral ;
    - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  
5. Sasaran 4.1 Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan, terdiri dari:
  1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika ;
    - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

## D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>8.123.087.000</b>	<b>7.840.318.628</b>	<b>96,52</b>
	<b>URUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG</b>	<b>7.489.044.600</b>	<b>7.263.570.673</b>	<b>96,99</b>
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>4.341.055.600</b>	<b>4.248.257.674</b>	<b>97,86</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.042.200</b>	<b>36.042.200</b>	<b>100,00</b>
	Sub.Keg.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.880.500	17.880.500	100,00
	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	10.314.000	10.314.000	100,00
	Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.847.700	7.847.700	100,00
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.637.326.300</b>	<b>3.581.272.588</b>	<b>98,46</b>
	Sub.Keg.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.607.682.300	3.551.628.588	98,45
	Sub.Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.266.000	4.266.000	100,00
	Sub.Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.378.000	25.378.000	100,00
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>25.032.500</b>	<b>12.622.500</b>	<b>50,42</b>
	Sub. Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.050.000	8.700.000	54,21
	Sub.Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.982.500	3.922.500	43,67
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>172.137.500</b>	<b>170.021.100</b>	<b>98,77</b>
	Sub.Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.275.000	119.463.000	98,51
	Sub.Keg.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.862.500	50.558.100	99,40

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>390.516.600</b>	<b>368.390.060</b>	<b>94,33</b>
	Sub.Keg.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.239.100	71.130.332	99,85
	Sub.Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.967.000	153.112.380	87,51
	Sub.Keg.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.350.000	28.350.000	100,00
	Sub.Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.960.500	115.797.348	99,86
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>80.000.500</b>	<b>79.909.226</b>	<b>99,89</b>
	Sub.Keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.500	79.909.226	99,89
2	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>1.400.345.300</b>	<b>1.356.369.493</b>	<b>96,86</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.400.345.300</b>	<b>1.356.369.493</b>	<b>96,86</b>
	Sub.Keg.Pengelolaan Media Komunikasi Publik	862.523.700	845.852.780	98,07
	Sub.Keg.Pelayanan Informasi Publik	286.614.900	265.384.212	92,59
	Sub.Keg.Layanan Hubungan Media	130.607.200	126.535.651	96,88
	Sub.Keg.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	16.284.000	15.781.500	96,91
	Sub.Keg.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	104.315.500	102.815.350	98,56
3	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>1.747.643.700</b>	<b>1.658.943.506</b>	<b>94,92</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Dana Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>228.422.150</b>	<b>220.100.300</b>	<b>96,36</b>
	Sub.Keg.Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	228.422.150	220.100.300	96,36
	<b>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.519.221.550</b>	<b>1.438.843.206</b>	<b>94,71</b>
	Sub.Keg.Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	123.950.300	122.084.461	98,49
	Sub.Keg.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Betbasis Elektronik	149.236.000	122.213.635	81,89

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	Sub.Keg.Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	93.318.250	47.493.204	50,89
	Sub.Keg.Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.152.717.000	1.147.051.906	99,51
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>259.592.400</b>	<b>236.209.016</b>	<b>90,99</b>
4	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>259.592.400</b>	<b>236.209.016</b>	<b>90,99</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>259.592.400</b>	<b>236.209.016</b>	<b>90,99</b>
	Sub.Keg.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	208.654.400	185.991.016	89,14
	Sub.Keg.Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	17.060.000	16.640.000	97,54
	Sub.Keg.Membangun Metadata Statistik Sektoral	33.878.000	33.578.000	99,11
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>374.450.000</b>	<b>340.538.939</b>	<b>90,94</b>
5	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>374.450.000</b>	<b>340.538.939</b>	<b>90,94</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>310.900.000</b>	<b>299.132.439</b>	<b>96,22</b>
	Sub.Keg.Penyediaan Layanan Keamanan dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	310.900.000	299.132.439	96,22
	<b>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>63.550.000</b>	<b>41.406.500</b>	<b>65,16</b>
	Sub.Keg.Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.550.000	41.406.500	65,16
	<b>J U M L A H</b>	<b>8.123.087.000</b>	<b>7.840.318.628</b>	<b>96,52</b>

Dalam rangka upaya pencapaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.123.087.00,- dan terealisasi sebesar Rp 7.840.318.628,- (96,51%), dengan realisasi

anggaran paling tinggi pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan realisasi anggaran terendah pada program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

#### E. Tindak Lanjut Terhadap LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

No	Catatan	Tindak Lanjut	Keterangan (Data Dukung)
1	Mengesahkan / menandatangani dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Mengesahkan/ menandatangani dokumen dukung SAKIP oleh Kepala Dinas	<a href="https://drive.google.com/drive/olders/1xsE4Rhc6t5sGPeGtLjiYg5buTuT4cWxB">https://drive.google.com/drive/olders/1xsE4Rhc6t5sGPeGtLjiYg5buTuT4cWxB</a>
2	Menyusun LKJIP sesuai dengan format peloporan dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dalam penyusunan LKJIP saat ini kami menyesuaikan dengan format yang telah ditetapkan.	<a href="https://drive.google.com/drive/olders/18aifgquEbDmjoiwWUEx0V-w4J7WUcvh">https://drive.google.com/drive/olders/18aifgquEbDmjoiwWUEx0V-w4J7WUcvh</a>
3	Melakukan evaluasi internal secara berkala dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Melakukan evaluasi Internal secara berkala	<a href="https://drive.google.com/drive/olders/1SJLrzHX1S2q94yL7pWsl8IPc50qWSb22">https://drive.google.com/drive/olders/1SJLrzHX1S2q94yL7pWsl8IPc50qWSb22</a>

No	Catatan	Tindak Lanjut	Keterangan (Data Dukung)
	serta memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja		

**BAB IV  
PENUTUP**

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik											
	Indikator Kinerja SS : Persentase Jumlah Pengelolaan Informasi, aduan dan desiminasi Informasi yang Bisa Diakses Masyarakat											
	Program 1.1	:	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik			1.400.345.300	1.356.369.493	96,86	100	100	100	
	Sasaran Program 1.1	:	Terlaksananya Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik									
	Indikator Kinerja Program	:	Persentase keterbukaan informasi publik									
				Kegiatan 1.1.1	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.400.345.300	1.356.369.493	96,86	5	5	100
				Sasaran Kegiatan 1.1.1	:	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
				Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jenis pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah						

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja		
						Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Reali sasi	%
				RO 1.1.1	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12	12	100
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				2	2	100
					Jumlah Layanan Hubungan Media				1	1	100
					Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				40	40	100
					Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2	2	100
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tata Kelola SPBE										
	Indikator Kinerja SS : Indeks Tata Kelola SPBE										
		Program 2.1	:		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.747.643.700	1.658.943.506	94,92	100	100	100
		Sasaran Program 2.1	:		Terlaksananya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						
		Indikator Kinerja Program	:		Persentase Infrastruktur jaringan terkoneksi dengan baik						

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja		
						Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Reali sasi	%
				Kegiatan 2.1.1	: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	228.422.150	220.100.300	96,36	77	77	100
				Sasaran Kegiatan 2.1.1	: Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
				Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik						
				RO 2.1.1	: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1	1	100
		Program 2.1	:	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		1.747.643.700	1.658.943.506	94,92	100	100	100
		Sasaran Program 2.2	:	Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar							
		Indikator Kinerja Program	:	Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar							

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja		
						Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Reali sasi	%
				Kegiatan 2.2.1	: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.519.221.550	1.438.843.206	94,71	5	5	100
				Sasaran Kegiatan 2.2.1	: Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
				Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah						
				RO 2.2.1	: Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1	1	100
					Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1	1	100
					Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1	1	100

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				5	5	100	
3	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kemudahan Akses Data Statistik Sektoral Bagi Masyarakat											
	Indikator Kinerja SS : Persentase Ketersediaan Informasi Statistik Sektoral yang Dapat Diakses Masyarakat											
	Program 3.1	:	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			259.592.400	236.209.016	90,99	100	100	100	
	Sasaran Program 3.1	:	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
	Indikator Kinerja Program	:	Persentase pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar									
				Kegiatan 3.1.1	:	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	259.592.400	236.209.016	90,99	8	8	100
				Sasaran Kegiatan 3.1.1	:	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
				Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan						
				RO 3.1.1	:	Jumlah Dokumen Koordinasi dan				4	4	100

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
					Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
					Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				46	46	100	
					Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1	1	100	
4	Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Pengelolaannya Persediaan dan Pengamanan											

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Informasi											
	Indikator Kinerja : Persentase Pengamanan Informasi Sesuai Peraturan yang Berlaku											
	Program 3.1	:	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			374.450.000	340.538.939	90,94	100	100	100	
	Sasaran Program 3.1	:	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi									
	Indikator Kinerja Program	:	Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dan Pengamanan Informasi									
				Kegiatan 3.1.1	:	Penyelenggaraan Persandian untuk	310.900.000	299.132.439	96,22	46	46	100

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Reali sasi	%	
				Sasaran Kegiatan 3.1.1	:	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
				Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian						
				RO 3.1.1	:	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				46	46	100
		Program 3.1	:	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			374.450.000	340.538.939	90,94	100	100	100
		Sasaran Program 3.2	:	Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dan pengamanan informasi								
		Indikator Kinerja Program	:	Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dan Pengamanan Informasi								
				Kegiatan 3.2.1	:	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	63.550.000	41.406.500	65,16	46	46	100

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Reali sasi	%	
						Daerah Kabupaten/Kota						
					Sasaran Kegiatan 3.2.1	: Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						
					Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah OPD yang tergabung dalam forum pengamanan informasi						
					RO 3.2.1	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				46	46	100
5	Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi											

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Manajemen Perangkat Daerah											
	Indikator Kinerja : Skor SAKIP Perangkat Daerah											
	Program 5.1	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.341.055.600	4.248.257.647	97,86	100	100	100	
	Sasaran Program 5.1	:	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indikator Kinerja Program	:	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah									
				Kegiatan 5.1.1	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.516.600	368.390.060	94,33	4	4	100

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Reali sasi	%	
				Sasaran Kegiatan 5.1.1	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan						
				RO 5.1.1	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12	12	100
					:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12	12	100
					:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7	7	100
					:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	12	100
				Kegiatan 5.1.2	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	80.000.500	79.909.226	99,89	2	2	100

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
					Sasaran Kegiatan 5.1.2 :	Pemerintahan Daerah						
					Indikator Kinerja Kegiatan :	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
					RO 5.1.2 :	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18	18	100
6	Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Capaian Kinerja											

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Perangkat Daerah											
	Indikator Kinerja : Prosentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah											
	Program 6.1	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.341.055.600	4.248.257.647	97,96	100	100	100	
	Sasaran Program 6.1	:	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Indikator Kinerja Program	:	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah									
				Kegiatan 6.1.1	:	Perencanaan, Penganggaran, dan	36.042.200	36.042.200	100	13	13	100

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja		
						Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Reali sasi	%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Sasaran Kegiatan 6.1.1	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun						
				RO 6.1.1	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7	7	100
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4	4	100
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2	2	100
		Program 6.1	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.341.055.600	4.248.257.647	97,96			
		Sasaran Program 6.2	:	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi							

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja			
						Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Reali sasi	%	
				perkantoran Perangkat Daerah								
		Indikator Kinerja Program	:	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah								
				Kegiatan 6.2.1	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.637.326.300	3.581.272.588	98,46	12	12	100
				Sasaran Kegiatan 6.2.1	:	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah						
				RO 6.2.1	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43	43	100
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12	12	100
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	12	100
				Kegiatan 6.2.2	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.032.500	12.622.500	50,42	2	2	100

No	Uraian				Belanja			Capaian Kinerja				
					Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Reali sasi	%		
				Sasaran Kegiatan 6.2.2	:	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan						
				RO 6.2.2	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				87	87	100
					:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3	3	100
				Kegiatan 6.1.3	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.137.500	170.021.100	98,77	12	12	100
				Sasaran Kegiatan 6.1.3	:	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah						
				RO 6.1.3	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10	10	100
					:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				12	12	100

No	Uraian					Belanja			Capaian Kinerja		
						Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
					dan Konsultasi SKPD						

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat target dan realisasi anggaran dan capaian kinerja program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan target anggaran sebesar Rp. 1.400.345.300,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.356.369.493,- dengan presentase realisasi 96,86 %. Untuk capaian kinerja dengan presentase target capaian 100 %, dapat terealisasi 100 %.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan target anggaran sebesar Rp. 1.747.643.700,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.658.943.506,- dengan presentase realisasi 94,92 %. Untuk capaian kinerja dengan presentase target capaian 100 %, dapat terealisasi 100 %.
3. Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan target anggaran sebesar Rp. 259.592.400,- dapat terealisasi sebesar Rp. 220.100.300,- dengan presentase realisasi 90,99 %. Untuk capaian kinerja dengan presentase target capaian 100 %, dapat terealisasi 100 %.
4. Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan target anggaran sebesar Rp. 374.450.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 340.538.939,- dengan presentase realisasi 90,94 %. Untuk capaian kinerja dengan presentase target capaian 100 %, dapat terealisasi 100 %.
5. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 4.341.055.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.248.257.647,- dengan presentase realisasi 97,86 %. Untuk capaian kinerja dengan presentase target capaian 100 %, dapat terealisasi 100 %

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik serta penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang sangat membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, antara lain : SDM pegawai yang memiliki keahlian di bidang teknologi komunikasi dan informasi dan SDM di bidang Statistik. SDM pegawai yang dimaksud bukan hanya pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika, melainkan juga personil TIK, diutamakan yang memiliki latar belakang teknologi informasi (pranata komputer) sebagai kepanjangan tangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan TIK di Perangkat Daerah yang lain.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang juga masih sangat membutuhkan sarana prasarana yang memadai, antara lain perluasan jaringan fiber optic secara bertahap untuk menjangkau Perangkat dengan jarak terdekat dari titik terakhir, kebutuhan sarana prasarana penunjang kegiatan keamanan informasi ( laptop, PC, printer, kamar sandi, dll )

Harapan ini semua akan dapat terwujud jika ada dukungan anggaran yang cukup memadai, dan mengingat pengadaan sarana prasarana TIK dan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi membutuhkan dana yang amat besar sehingga harus ada komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan terkait anggaran.

Keberhasilan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang melalui penyelenggaraan electronic government dalam mewujudkan Kabupaten Semarang smart city (Kota Cerdas) sangat tergantung pada kekuatan sumber daya sebagaimana diatas, serta dukungan kebijakan terkait anggaran dari para pengambil keputusan (decision maker) Pemerintahan Kabupaten Semarang. Kondisi sampai saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika masih mengalami kekurangan SDM pegawai yang memiliki kapasitas di bidang aplikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **2. Saran**

Saran masukan kami terutama untuk pemikiran kedepan sebagai langkah memperbaiki dan membangun penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan penataan dan pembinaan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah dengan tujuan untuk memperkuat kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos : 50511  
Telp. (024) 6921371 Faks. (024) 6921371  
E-mail : [kominfo@semarangkab.go.id](mailto:kominfo@semarangkab.go.id) Website : <http://www.diskominfosemarangkab.go.id/>

**RENCANA AKSI**

**PERANGKAT DAERAH : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN				PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN				SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN												PAGU (Rp)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				(16)	(17)	(18)	(19)	(20)												(21)
1	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	100 %	0	0	0	100	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	0	0	0	100	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	13 dokumen	3	3	3	4	2.16.01.2.01.00 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	17.880.500
2																									4 dokumen	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	10.314.000		
3																									2 dokumen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7.847.700		
4																									12 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.607.682.300	
5																									12 bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.266.000		
6																									12 bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25.378.000		
7																										87 paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	16.050.000	
8																										3 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	8.982.500		









## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Petrus Triyono, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Basari

Jabatan : Plt. Bupati Semarang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 8 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Plt. Bupati Semarang  
Basari



Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Petrus Triyono, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720423 199203 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

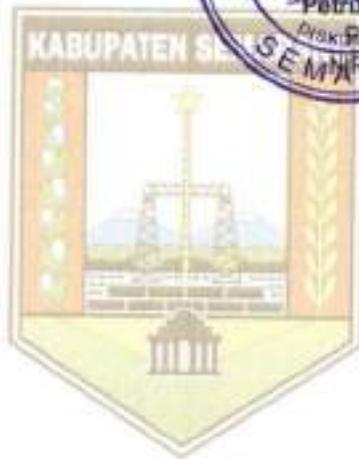
Tabel I

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan tata Pemerintahan berbasis E-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.25	3.25
2	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Persentase jumlah pengelolaan informasi, aduan dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	100%	100%
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks Tata Kelola SPBE	3.4	3.4
4	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Sektoral	Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral	100%	100%
5	Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat	Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat	100%	100%
6	Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan	100%	100%
7	Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Persentase pengamanan Informasi sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%
8	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Skor SAKIP Perangkat Daerah	51.86	71.63
9	Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%

Tabel II

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,759,788,700	1,747,643,700
2	Indeks Tata Kelola SPBE			
3	Persentase jumlah pengelolaan informasi, aduan dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,418,553,800	1,400,345,300
4	Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral			
5	Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	263,336,900	259,592,400
6	Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan			
7	Persentase pengamanan Informasi sesuai peraturan yang berlaku	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	379,775,000	374,450,000

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5
8	Skor SAKIP Perangkat Daerah	Program Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,286,025,600	4,341,055,600
9	Prosentase capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah			
<b>Jumlah</b>			<b>8,107,480,000</b>	<b>8,123,087,000</b>



Petrus Triyono, S.Sos., M.Si.  
 Disak: Pemuda Utama Muda  
 081231992031005



www.kabupatirsukoharjo.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SEKRETARIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tabel I

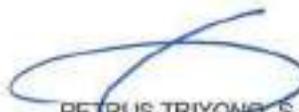
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	13 Dokumen	13 Dokumen
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	2 jenis	2 jenis
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan
5	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	4 jenis	4 jenis
6	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 jenis	2 jenis

Tabel II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Program	Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.642.200	36.042.200
2	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.669.280.300	3.637.326.300
3	Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.912.500	25.032.500
4	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.122.000	172.137.500
5	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.035.100	390.516.600

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Program	Kegiatan	Target Anggaran Persetujuan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
5	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.033.500	80.000.500
				4.288.025.000	4.341.055.600

PINAK II  
KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
PETRUS TRIYONO, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720423 199203 1 005

Ungaran, 11 Oktober 2024  
PINAK I  
SEKRETARIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
SIDIQ SUDIBYO, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711221 199603 1 008



DEWATA SAKTI PALA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**

Tabel I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	Prosentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Jenis pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	5 jenis	5 jenis

Tabel II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Program	Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jenis pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	1.418.553.900	1.400.345.900

PIHAK II  
KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
PETRUS TRITONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720423 198203 1 005

Ungaran, 11 Oktober 2024  
PIHAK I  
KEPALA BIDANG  
KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

  
Drs. GATOT HARJANTO

Penata Tingkat I  
NIP. 19870605 198003 1 013



DHARMODRMA SUTYA PRAJA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG**  
**APLIKASI DAN INFORMATIKA**

Tabel I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya late kelola SPBE	Persentase layanan eGovernment di pemerintah kabupaten Semarang	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	77 titik	77 titik
2	Meningkatnya late kelola SPBE	Persentase layanan eGovernment di pemerintah kabupaten Semarang	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah	5 kegiatan	5 kegiatan

Tabel II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Program	Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	228.222.150	228.422.150
2	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.530.688.650	1.519.221.650
				1.759.788.700	1.747.643.700

PIHAK II  
**KEPALA DINAS**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

  
PETRUS TRIYONO, S.Sos., M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19720423 199203 1 005

Ungaran, 11 Oktober 2024

PIHAK I  
**KEPALA BIDANG**  
**APLIKASI DAN INFORMATIKA**

  
KHAIRUL AULIA, S.Kom., M.Eng.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19810507 201101 1 005



KEBUDAJARHATAN DAERAH PANGINAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KEPALA BIDANG  
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Tabel I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pemanfaatan data Statistik Sektoral	Ketersediaan informasi statistik sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan	8 Dokumen	8 Dokumen
2	Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian	46 PD	46 PD
3	Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah OPD yang tergabung dalam forum pengamanan informasi	46 PD	46 PD

Tabel II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Program	Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	263.395.900	259.592.400
2	Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	314.500.000	310.900.000
3	Jumlah OPD yang tergabung dalam forum pengamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pendapan Pola Hubungan Komunikasi Sاند Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	55.275.000	53.550.000
				<b>643.111.900</b>	<b>634.042.400</b>

**PIHAK II  
KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PETRUS TRIYONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720423 199203 1 005

Ungaran, 11 Oktober 2024  
**PIHAK I  
KEPALA BIDANG  
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

AMELIA GRETA PAULINA, S.STP., M.M.

Penasihat Tingkat I  
NIP. 19910820 201206 2 001



BALAYOGAMA BANTAEANG

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Tabel I

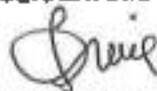
No	Bebaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	43 Orang
5	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen

Tabel II

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.180.500	17.880.500

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.614.000	10.314.000
3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.847.700	7.847.700
4	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.538.138.300	3.607.682.300
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.878.000	25.378.000
				<b>3.801.658.500</b>	<b>3.889.102.500</b>

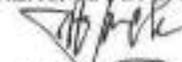
PIHAK II  
SEKRETARIS



SIDIQ SUDIBYO, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711221 199803 1 008

Ungaran, 11 Oktober 2024

PIHAK I  
KEPALA SUBBAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN



NIA PUSPITA SARI, S.E.  
Penasihat Tingkat I  
NIP. 19820312 200902 2 008



BANJARMASIN  
KABUPATEN BANJARMASIN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

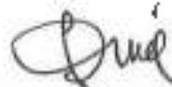
Tabel 1

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	57 Paket
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket
5	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
6	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan
7	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
8	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan
9	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
10	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit

Tabel M

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.266.000	4.266.000
2	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.100.000	16.030.000
3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.812.500	8.862.500
4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.275.000	121.275.000
5	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.847.000	60.862.500
6	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68.587.100	71.239.100
7	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.562.000	174.987.000
8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.172.000	28.350.000
9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.724.000	115.960.500
10	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.033.500	80.000.500
				884.368.100	671.953.100

PIHAK II  
SEKRETARIS



SIDIQ SUDIBYO, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711221 199803 1 008

Ungaran, 11 Oktober 2024  
PIHAK I  
KEPALA SUBBAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN



DEVI AGUSTINI, S.E., M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19860603 201001 2 032



KABUPATEN SUKOHARJO

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG INFORMASI PUBLIK**

Tabel I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	Jenis pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1 Layanan
2	Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	Jenis pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang
3	Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kamtibmas dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel II

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Layanan Hubungan Media	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Layanan Hubungan Media	131.851.700	130.607.200
2	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	16.284.000	16.284.000

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
3	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kerjasama Komunitas	104.315.500	104.315.500
				252.461.200	251.206.700

PIHAK II  
 KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Drs. GATOT HARJANTO  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19670605 199003 1 013

Ungaran, 11 Oktober 2024

PIHAK I  
 KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK,  
 KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG INFORMASI PUBLIK

Drs. GATOT HARJANTO  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19670605 199003 1 013



KABUPATEN KUTAI TIMUR

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK**

Tabel I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Sub-Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen
2	Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel II

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	859.996.200	852.523.700
2	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pelayanan Informasi Publik	296.096.400	296.814.900
				<b>1.156.092.600</b>	<b>1.149.338.600</b>

Ungaran, 11 Oktober 2024

PIHAK II  
KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

PIHAK I  
KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK,  
KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Drs. GATOT HARJANTO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19670605 199003 1 013

Drs. GATOT HARJANTO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19670605 199003 1 013



WABROUBER SAKTI, PAJAJ

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DAN APLIKASI**

Tabel I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola SPBE	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan Egov pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit
2	Meningkatnya tata kelola SPBE	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan Egov pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan Egov pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel II

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	125.975.300	123.950.300
2	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	152.691.000	149.236.000

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
3	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	97.143.250	83.318.250
				375.809.550	368.504.550

Ungaran, 11 Oktober 2024

PIHAK II  
**KEPALA BIDANG**  
**APLIKASIDAN INFORMATIKA**  
  
 KHAIRUL AULIA, S.Kom., M.Eng.  
 Penata Tingkat I  
 NIP.19810507 201101 1 005

PIHAK I  
**KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA,**  
**KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG PENGELOLAAN E-GOVERNMENT**  
**DAN APLIKASI**  
  
 KHAIRUL AULIA, S.Kom., M.Eng.  
 Penata Tingkat I  
 NIP.19810507 201101 1 005



DHARMOJAMA SAFWA PALAJA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KETUA TIM KERJA BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Tabel I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola SPBE	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit
2	Meningkatnya tata kelola SPBE	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan Egov pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen

Tabel II

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	228.222.150	228.422.150
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.154.757.000	1.152.717.000
				1.383.979.150	1.381.139.150

**PIHAK II  
KEPALA BIDANG  
APLIKASI DAN INFORMATIKA**

*Khairul Aulia*  
**KHAIRUL AULIA, S.Kom., M.Eng.**  
Penata Tingkat I  
NIP.19810507 201101 1 005

Ungaran, 11 Oktober 2024  
**PIHAK I**

**KETUA TIM KERJA BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI  
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA**

*Hari Widagdo*  
**HARI WIDAGDO, S.Kom.**  
Penata Tingkat I  
NIP.19740209 200902 1 001



WALIKABUPATEN SUKOHARJO

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG STATISTIK**

Tabel I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat	Jumlah buku statistik sektoral yang dipublikasikan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4 Dokumen
2	Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat	Jumlah buku statistik sektoral yang dipublikasikan	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	46 Orang	46 Orang
3	Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat	Jumlah buku statistik sektoral yang dipublikasikan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel II

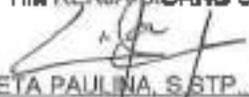
No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	210.058.900	208.654.400
2	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	18.650.000	17.050.000

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
3	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	34.628.000	33.878.000
				263.336.900	258.562.400

PIHAK II  
KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

  
AMELIA GRETA PAULINA, S.STP., M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP.19910820/201206 2 001

Ungaran, 11 Oktober 2024  
PIHAK I  
KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK,  
KOORDINATOR TIM KERJA BIDANG STATISTIK

  
AMELIA GRETA PAULINA, S.STP., M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP.19910820/201206 2 001



PALANG KABUPATEN SANDI UTAMA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KETUA TIM KERJA BIDANG PERSANDIAN**

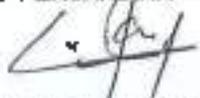
Tabel I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	46 PD	46 PD
2	Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Jumlah OPD yang tergabung dalam forum pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	46 PD	46 PD

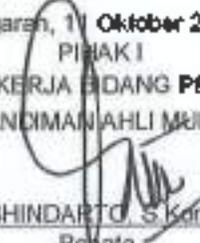
Tabel II

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	314.500.000	310.900.000
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.275.000	63.550.000
				379.775.000	374.450.000

PIHAK II  
KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

  
AMELIA GRETA PAULINA, S.STP., M.M.  
Pegawai Tingkat I  
NIP. 199108202012062001

Ungaran, 11 Oktober 2024  
PIHAK I  
KETUA TIM KERJA BIDANG PERSANDIAN,  
SANDIMAN AHLI MUDA

  
DANI KUSHINDARTO, S.Kom., M.Eng.  
Pegawai  
NIP. 198404262010011022

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perangkat daerah</b>	Nilai LKJIP	71,62 nilai						
1	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	100.00 %	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	4.341.055.600	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2				2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	13 dokumen	36.042.200		
3				2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.637.326.300		
4				2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang tertib dan baik.	tahun	25.032.500		
5					Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang tertib dan baik.	tahun			
6					Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	2 jenis			
7				2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	172.137.500		
8				2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 jenis	390.516.600		
9				2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	80.000.500		
	<b>Meningkatkan kualitas pengelolaan tata pemerintahan berbasis e-government</b>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25 nilai						
10	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3.40 nilai	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Infrastruktur jaringan terkoneksi dengan baik	100 %	1.747.643.700	Dinas Komunikasi dan Informatika	
11					Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar	100 %			
12				2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	77 titik	228.422.150		
13				2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah	5 kegiatan	1.519.221.550		





**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos : 50511  
Telp. (024) 6921371 Faks. (024) 6921371  
E-mail : [kominfo@semarangkab.go.id](mailto:kominfo@semarangkab.go.id) Website : <http://www.diskominfosemarangkab.go.id/>

**EVALUASI RENCANA AKSI  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B2	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW I						TW I									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B1	(13)	(14)	(15)	B3	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)
1.	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	100 %	0	0	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	0	0	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	1	1	1	1	1	1	17.474.000	17.880.500	-	
2.				0	0					0	0			2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	0	0	0	0	1	1	10.014.000	10.314.000	-		
3.				0	0					0	0			2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Evaluasi Renja PD dan capaian IK)	2 dokumen	0	0	0	0	0	0	5.847.700	7.847.700	-		
4.				0	0					0	0	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	12 dokumen	1	1	1	1	1	1	4.013.959.000	3.607.682.300	-	
5.				0	0					0	0			2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyusunan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	1	1	1	1	1	1	3.466.000	4.266.000	-		
6.				0	0					0	0			2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan, gaji dan aset	12 bulan	1	1	1	1	1	1	22.038.000	25.378.000	-		
7.				0	0					0	0	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 paket	0	0	0	0	0	0	16.050.000	16.050.000	-	
8.				0	0					0	0			2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	0	0	0	8.982.500	8.982.500	-		
9.				0	0					0	0	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	1	1	1	1	1	1	123.315.000	121.275.000	-	
10.				0	0					0	0			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1	1	1	1	1	1	42.506.000	50.862.500	-		
11.				0	0					0	0	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing	12 bulan	1	1	1	1	1	1	70.621.500	71.239.100	-	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B2	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket	
				TW I						TW I									B1		B2		B3			T	R		
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R					T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B1	(13)	(14)	(15)	B3	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)	
12.				0	0					0	0						2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (telpon/internet, PDAM, Listrik)	12 bulan	1	1	1	1	1	1	161.552.000	174.967.000	-
13.				0	0					0	0						2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan elektronik dan perlengkapan kantor	12 bulan	1	1	1	1	1	1	21.172.000	28.350.000	-
14.				0	0					0	0						2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing	12 bulan	1	1	1	1	1	1	122.897.100	115.960.500	-
15.				0	0					0	0	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1	1	1	1	1	1	128.104.000	80.000.500	-
16.	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3,4 nilai	0	0	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Infrastruktur jaringan terkoneksi dengan baik	100 %	0	0	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	2.16.03.2.01.0003 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	77 Titik	0	0	0	0	0	0	366.510.500	228.422.150	-		
17.				0	0			Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar	100 %	0	0								Jumlah paket pengembangan jaringan FO yang dilaksanakan	1 Paket	0	0	0	0	0	0	-		
18.				0	0					0	0	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah	2.16.03.2.02.0003 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan pusat data pemerintah daerah	1 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	565.975.800	123.950.300	-		
19.				0	0					0	0								Tersedianya media pengelolaan pusat data (server pusat data)	1 Paket	0	0	0	0	0	0	-		
20.				0	0					0	0						2.16.03.2.02.0007 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen masterplan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	83.691.000	149.236.000	-
21.				0	0					0	0						2.16.03.2.02.0009 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan smart city dan SPBE yang dilaksanakan	6 Kali	0	0	0	0	0	0	249.936.000	93.318.250	-
22.				0	0					0	0								Jumlah aplikasi pengelolaan kedaruratan (call center)	1 Paket	0	0	0	0	0	0	-		
23.				0	0					0	0						2.16.03.2.02.0010 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan intranet dan internet yang dikelola	3 Paket	0	0	0	0	0	0	1.414.757.000	1.152.717.000	-





**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos : 50511  
Telp. (024) 6921371 Faks. (024) 6921371  
E-mail : [kominfo@semarangkab.go.id](mailto:kominfo@semarangkab.go.id) Website : <http://www.diskominfosemarangkab.go.id/>

**EVALUASI RENCANA AKSI  
TRIWULAN II TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B5	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW II						TW II									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B4	(13)	(14)	(15)	B6	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)
1.	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	100 %	0	0	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	0	0	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	0	0	1	1	0	0	17.474.000	17.880.500	-	
2.				0	0					0	0			2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	0	0	0	0	1	1	10.014.000	10.314.000	-		
3.				0	0					0	0			2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Evaluasi Renja PD dan capaian IK)	2 dokumen	0	0	0	0	1	1	5.847.700	7.847.700	-		
4.				0	0					0	0	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	12 dokumen	1	1	1	1	1	1	4.013.959.000	3.607.682.300	-	
5.				0	0					0	0			2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyusunan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	1	1	1	1	1	1	3.466.000	4.266.000	-		
6.				0	0					0	0			2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan, gaji dan aset	12 bulan	1	1	1	1	1	1	22.038.000	25.378.000	-		
7.				0	0					0	0	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 paket	0	0	0	0	0	0	16.050.000	16.050.000	-	
8.				0	0					0	0			2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	0	0	0	8.982.500	8.982.500	-		
9.				0	0					0	0	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	1	1	1	1	1	1	123.315.000	121.275.000	-	
10.				0	0					0	0			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1	1	1	1	1	1	42.506.000	50.862.500	-		
11.				0	0					0	0	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing	12 bulan	1	1	1	1	1	1	70.621.500	71.239.100	-	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B5	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket	
				TW II						TW II									B1		B2		B3			T	R		
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R					T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B4	(13)	(14)	(15)	B6	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)	
12.				0	0					0	0						2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (telpon/internet, PDAM, Listrik)	12 bulan	1	1	1	1	1	1	161.552.000	174.967.000	-
13.				0	0					0	0						2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan elektronik dan perlengkapan kantor	12 bulan	1	1	1	1	1	1	21.172.000	28.350.000	-
14.				0	0					0	0						2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing	12 bulan	1	1	1	1	1	1	122.897.100	115.960.500	-
15.				0	0					0	0	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1	1	1	1	1	1	128.104.000	80.000.500	-
16.	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3,4 nilai	0	0	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Infrastruktur jaringan terkoneksi dengan baik	100 %	0	0	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	2.16.03.2.01.0003 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	77 Titik	0	0	0	0	0	0	366.510.500	228.422.150	-		
17.				0	0			Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar	100 %	0	0							Jumlah paket pengembangan jaringan FO yang dilaksanakan	1 Paket	0	0	0	0	0	0	-			
18.				0	0					0	0	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah	2.16.03.2.02.0003 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan pusat data pemerintah daerah	1 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	565.975.800	123.950.300	-		
19.				0	0					0	0							Tersedianya media pengelolaan pusat data (server pusat data)	1 Paket	0	0	0	0	0	0	-			
20.				0	0					0	0						2.16.03.2.02.0007 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen masterplan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	83.691.000	149.236.000	-
21.				0	0					0	0						2.16.03.2.02.0009 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan smart city dan SPBE yang dilaksanakan	6 Kali	0	0	0	0	0	0	249.936.000	93.318.250	-
22.				0	0					0	0							Jumlah aplikasi pengelolaan kedaruratan (call center)	1 Paket	0	0	0	0	0	0	-			
23.				0	0					0	0						2.16.03.2.02.0010 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan intranet dan internet yang dikelola	3 Paket	0	0	0	0	0	0	1.414.757.000	1.152.717.000	-





**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos : 50511  
Telp. (024) 6921371 Faks. (024) 6921371  
E-mail : [kominfo@semarangkab.go.id](mailto:kominfo@semarangkab.go.id) Website : <http://www.diskominfosemarangkab.go.id/>

**EVALUASI RENCANA AKSI  
TRIWULAN III TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B8	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW III						TW III									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B7	(13)	(14)	(15)	B9	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)
1.	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	100 %	0	0	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	0	0	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	1	1	1	1	0	0	17.474.000	17.880.500	-	
2.				0	0					0	0			2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	0	0	0	0	1	1	10.014.000	10.314.000	-		
3.				0	0					0	0			2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Evaluasi Renja PD dan capaian IK)	2 dokumen	0	0	0	0	0	0	5.847.700	7.847.700	-		
4.				0	0					0	0	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	12 dokumen	1	1	1	1	1	1	4.013.959.000	3.607.682.300	-	
5.				0	0					0	0			2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyusunan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	1	1	1	1	1	1	3.466.000	4.266.000	-		
6.				0	0					0	0			2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan, gaji dan aset	12 bulan	1	1	1	1	1	1	22.038.000	25.378.000	-		
7.				0	0					0	0	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 paket	0	0	0	0	0	0	16.050.000	16.050.000	-	
8.				0	0					0	0			2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	0	3	3	8.982.500	8.982.500	-		
9.				0	0					0	0	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	1	1	1	1	1	1	123.315.000	121.275.000	-	
10.				0	0					0	0			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1	1	1	1	1	1	42.506.000	50.862.500	-		
11.				0	0					0	0	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing	12 bulan	1	1	1	1	1	1	70.621.500	71.239.100	-	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B8	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW III						TW III									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B7	(13)	(14)	(15)	B9	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)
12.				0	0					0	0							12 bulan	1	1	1	1	1	1	161.552.000	174.967.000	-	
13.				0	0					0	0							12 bulan	1	1	1	1	1	1	21.172.000	28.350.000	-	
14.				0	0					0	0							12 bulan	1	1	1	1	1	1	122.897.100	115.960.500	-	
15.				0	0					0	0	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1	1	1	1	1	1	128.104.000	80.000.500	-	
16.	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3,4 nilai	0	0	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Infrastruktur jaringan terkoneksi dengan baik	100 %	0	0	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	2.16.03.2.01.0003 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	77 Titik	0	0	0	0	0	0	366.510.500	228.422.150	-	
17.				0	0			Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar	100 %	0	0							1 Paket	0	0	0	0	0	0	-			
18.				0	0					0	0	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah	2.16.03.2.02.0003 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan pusat data pemerintah daerah	1 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	565.975.800	123.950.300	-	
19.				0	0					0	0							1 Paket	0	0	0	0	0	0	-			
20.				0	0					0	0				2.16.03.2.02.0007 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen masterplan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	83.691.000	149.236.000	-	
21.				0	0					0	0				2.16.03.2.02.0009 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan smart city dan SPBE yang dilaksanakan	6 Kali	0	0	0	0	0	0	249.936.000	93.318.250	-	
22.				0	0					0	0							1 Paket	0	0	0	0	0	0	-			
23.				0	0					0	0				2.16.03.2.02.0010 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan intranet dan internet yang dikelola	3 Paket	0	0	0	0	0	0	1.414.757.000	1.152.717.000	-	





**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos : 50511  
Telp. (024) 6921371 Faks. (024) 6921371  
E-mail : [kominfo@semarangkab.go.id](mailto:kominfo@semarangkab.go.id) Website : <http://www.diskominfosemarangkab.go.id/>

**EVALUASI RENCANA AKSI  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B11	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW IV						TW IV									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B10	(13)	(14)	(15)	B12	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)
1.	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	100 %	100	100	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100	0	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	1	1	0	0	0	0	17.474.000	17.880.500	-	
2.				0	0					0	0			2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	1	1	0	0	0	0	10.014.000	10.314.000	-		
3.				0	0					0	0			2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Evaluasi Renja PD dan capaian IK)	2 dokumen	0	0	0	0	1	1	5.847.700	7.847.700	-		
4.				0	0					0	0	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	12 dokumen	1	1	1	1	1	1	4.013.959.000	3.607.682.300	-	
5.				0	0					0	0			2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyusunan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	1	1	1	1	1	1	3.466.000	4.266.000	-		
6.				0	0					0	0			2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan, gaji dan aset	12 bulan	1	1	1	1	1	1	22.038.000	25.378.000	-		
7.				0	0					0	0	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 paket	0	0	87	87	0	0	16.050.000	16.050.000	-	
8.				0	0					0	0			2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	0	0	0	8.982.500	8.982.500	-		
9.				0	0					0	0	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	1	1	1	1	1	1	123.315.000	121.275.000	-	
10.				0	0					0	0			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1	1	1	1	1	1	42.506.000	50.862.500	-		
11.				0	0					0	0	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing	12 bulan	1	1	1	1	1	1	70.621.500	71.239.100	-	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B11	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW IV						TW IV									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B10	(13)	(14)	(15)	B12	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)
12.				0	0					0	0							12 bulan	1	1	1	1	1	1	161.552.000	174.967.000	-	
13.				0	0					0	0							12 bulan	1	1	1	1	1	1	21.172.000	28.350.000	-	
14.				0	0					0	0							12 bulan	1	1	1	1	1	1	122.897.100	115.960.500	-	
15.				0	0					0	0	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1	1	1	1	1	1	128.104.000	80.000.500	-	
16.	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3,4 nilai	3,4	3	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Infrastruktur jaringan terkoneksi dengan baik	100 %	100	0	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	2.16.03.2.01.0003 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	77 Titik	0	0	0	0	77	77	366.510.500	228.422.150	-	
17.				0	0			Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar	100 %	100	0							1 Paket	0	0	0	0	1	1	-			
18.				0	0					0	0	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan eGovernment pemerintah daerah	2.16.03.2.02.0003 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan pusat data pemerintah daerah	1 Kegiatan	0	0	0	0	1	1	565.975.800	123.950.300	-	
19.				0	0					0	0							1 Paket	0	0	0	0	1	1	-			
20.				0	0					0	0	2.16.03.2.02.0007 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen masterplan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.0007 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen masterplan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	0	0	0	0	1	1	83.691.000	149.236.000	-	
21.				0	0					0	0	2.16.03.2.02.0009 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan smart city dan SPBE yang dilaksanakan	2.16.03.2.02.0009 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan smart city dan SPBE yang dilaksanakan	6 Kali	0	0	0	0	6	6	249.936.000	93.318.250	-	
22.				0	0					0	0							1 Paket	0	0	0	0	1	1	-			
23.				0	0					0	0	2.16.03.2.02.0010 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan intranet dan internet yang dikelola	2.16.03.2.02.0010 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan intranet dan internet yang dikelola	3 Paket	0	0	0	0	3	3	1.414.757.000	1.152.717.000	-	



**AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2024**

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah					
		Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.341.055.600,00	4.248.257.674,00	97,86
2	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					
		Indeks tata kelola SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.747.643.700,00	1.658.943.506,00	94,92
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik					
		Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.400.345.300,00	1.356.369.493,00	96,86
4	Meningkatnya kemudahan akses data statistik sektoral bagi masyarakat					
		Persentase ketersediaan informasi statistik sektoral yang dapat diakses masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	259.592.400,00	236.209.016,00	90,99
5	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah					
		Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	374.450.000,00	340.538.939,00	90,94